

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai pudar. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM – mandiri Perdesaan ) mulai tahun 2007 untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptakan lapangan kerja. Melalui PNPM – Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

PNPM – Mandiri Perdesaan tahun 2007 merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) sejak tahun 1999. Sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan disertakan program pendukung seperti PNPM Generasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus ( P2DTK ) untuk pengembangan daerah tertinggal, Mulai tahun 2008 PNPM – Mandiri Perdesaan diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk mengintegrasikan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM – Mandiri Perdesaan tahun 2008 juga diprioritaskan pada desa – desa tertinggal.

Ruang lingkup kegiatan PNPM – mandiri Perdesaan pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana / sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya ; penyedia sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin ( perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ); kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemimpinan yang baik.

Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) adalah lembaga di tingkat Kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM -Mandiri

Perdesaan yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan meliputi kegiatan prasarana sarana, pendidikan, kesehatan, UEP ( Usaka Ekonomi Produktif ) dan SPP ( Simpan Pinjam khusus Perempuan). Kegiatan UEP dan SPP dikelola dan disalurkan sebagai dana bergulir di tingkat Kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dalam penyaluran dana bergulir tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu melainkan kepada kelompok yakni Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Simpan Pinjam. Prinsip transparansi, partisipasi, keberpihakan pada orang miskin, akuntabilitas dana bergulir ( PTO Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan ).

Tujuan umum PNPM – Mandiri Perdesaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, sejalan dengan tujuan tersebut maka dunia usaha pun termotivasi untuk semakin berkembang dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha di perdesaan, sehingga mereka mendapat peluang kerja, meningkatkan usaha dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga meningkatkan pula kesejahteraan daerahnya, baik yang bergerak di bidang jasa maupun industri terutama industri rumah tangga dan industri kecil. Untuk menumbuhkan kegiatan usaha tersebut, melalui Program PNPM – Mandiri Perdesaan, pemerintah telah memberikan kredit pada Lembaga Unit Pengelolaan Kegiatan ( UPK ) PNPM – Mandiri Perdesaan khususnya di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Visi PNPM – mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin dasar masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan

berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM – Mandiri Perdesaan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan ( PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 2008 )

Strategi yang dikembangkan PNPM – Mandiri Perdesaan dalam rangka mencapai visi dan misi PNMP – Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagaimana pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM – mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ).

Disamping itu PNPM - Mandiri Perdesaan berfungsi sebagai salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan

bagi rakyat miskin atau masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha mereka. Upaya pemerintah dalam pembangunan untuk pemerataan ekonomi masyarakat. PNPM-Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan memanfaatkan sebagian dana BLM (bantuan langsung masyarakat) untuk kegiatan pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan menumbuhkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab dan rasa kebersamaan.

Berdasarkan uraian melalui tersebut diatas penulis memilih judul :  
**Pengaruh Pemberian Dana Bergulir ( PNPM –Mandiri Perdesaan )  
Terhadap Pendapatan Keluarga di Desa Wotan.**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan dan penerapannya dalam masyarakat.
2. Bagaimana pengaruh dana bergulir PNPM - Mandiri Perdesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendapatan keluarga di Desa Wotan.

## **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep dan pemanfaatan program PNPM – Mandiri Perdesaan di Desa Wotan Kecamatan Pulung
2. Mengetahui hasil yang dicapai program PNPM – Mandiri Perdesaan terkait masalah pendapatan dalam keluarga masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Pulung.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan dalam meningkatkan keberhasilan program PNPM – Mandiri Perdesaan Khususnya kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan, baik yang dilaksanakan di Desa Wotan maupun untuk Desa – Desa lain di Kecamatan Pulung.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan melihat konsep, penerapan serta hasil yang dicapai dari program PNPM-Mandiri, maka hasil penelitian ini akan mampu memberikan masukan dan memberikan data stimulant bagi penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama, atau penelitian dengan pokok bahasan yang bersinggungan dengan penelitian ini.

### 3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai telaah atas efektifitas upaya yang dilakukan, artinya apabila program ini mampu mengurangi kemiskinan dan membantu peningkatan pendapatan keluarga maka untuk langkah selanjutnya harus dipertahankan dan di tingkatkan, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya maka harus dilakukan peninjauan ulang terkait kelemahan yang terjadi, agar cita – cita kemandirian dapat terwujud.